**BAB II**

**Literatur Review**

1. **Literatur Review**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan literatur *review* yang berkaitan dengan variabel bebas, variabel terikat dan korelasi antar kedua variabel tersebut. Dengan adanya literatur *review,* akan memudahkan penulisan karya ilmiah (skripsi). Disamping itu, hal tersebut juga dapat menghindari tindakan plagiarisme.

1. **Indonesia (Fundarising Strategy Implementation In Save The Children Indonesia).**

Pertama penelitian dari Yessi Rachmasari Soni Akhmad Nulhaqim Nurliana Cipta Apsari Alumni Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Dosen Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Dosen Departemen Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran pada tahun 2014 yang berjudul tentang “Penerapan Strategi Fundarising di Save The Children Penelitian ini membahas tentang Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi fundraising yang dilakukan oleh Save The Children Indonesia meliputi strategi dialogue fundraising, strategi corporate fundraising, strategi multichannel fundraising, strategi retention and development donor. Strategi fundraising ini sebagai salah satu upaya Save The Children Indonesia untuk mendapatkan sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas dan program kegiatannya, melalui strategi fundraising ini Save The Children Indonesia dapat mengurangi ketergantungan dengan lembaga donor utama.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan teknik studi kasus. Penelitian ini melibatkan sembilan informan, yang terdiri dari, pengurus dalam unit divisi fundraising, fundraiser, donatur individu dan penerima donasi. Penentuan informan dilakukan berdasarkan tujuan penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan strategi fundraising yang dilakukan oleh Save The Children Indonesia.[[1]](#footnote-1)

1. **Paradigma Pendidikan Inklusif sebagai Upaya Memperluas Akses dan Perbaikan Mutu Pendidikan**

Yang ke 2 ada riset dari Zaenal Alimin Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Terdapat dua tantangan besar yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini yaitu:

(1) Periambahan jumlah anak yang tereklusikan (terbaikan) dari partisipasi pendidikan semakin banyak. Diperkirakan ada sekitar 113 juta anak usia sekolah dasar di seluruh dunia termasuk anak disabilitas, tidak memperoleh kesempatan pendidikan dasar (International Consultative Forum onEducationfor All, 2000), 90% dari mereka hidup di negara berkembang termasuk di Indonesia. Di samping itu anak-anak yang sudah masuk sekolah dasar pun dihadapkan pada masalah drop out sebelum dapat menyelesaikan pendidikan (UNESCO, 2000),

(2) Pendidikan secara spesifik sekolah masih belum memberi keuntungan kepada semua anak. Artinya kebutuhan belajar anak secara individual belum dapat dipenuhi. Sekolah lebih menekankan pada pencapaian akademik dari pada mengembangkan anak sebagai individu mencapai perkembangan optimal. Untuk mengatasi dua tantangan itu maka secara international terjadi pergeseran paradigma pendidikan dari pendidikan yang berifat konvensional (ekslusif) ke pendidikan yang menjangkau semua anak yang bersifat inklusif. Sehubungan dengan itu, tulisan iniakan mendiskusikan tentang paradigma pendidikan inklusif.[[2]](#footnote-2)

1. **PENGETAHUAN MAHASISWA PG-PAUD UNIPA SURABAYA TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF**

Yang ke 3 penelitian dari Muchamad Irvan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 2017 Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mewujudkan besarnya perhatian pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan inklusif, pada tahun 2009 Menteri Penidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas No.70 tentang pendidikan inklusif. Permendiknas No.70 tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan implementasi pendidikan inklusif di wilayah masing-masing.

. Dalam hal ini, mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan yang notabene sebagai calon tenaga pendidik baik dalam lingkup sekolah dasar maupun sekolah menengah, dituntut untuk memiliki kompetensi dan pengetahuan secara khusus tentang pendidikan inklusif demi berperan serta mensukseskan penyelenggaraan sekolah inklusi di setiap daerah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan yang dimiliki mahasiswa tentang pendidikan inklusif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 38 mahasiswa PG-PAUD UNIPA Surabaya.

Proses pengumpulan informasi ialah dengan teknik angket terbuka. Adapun analisis data penelitian menggunakan teknik uji tanda. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif dan data kuantitatif dianalisis dengan rumus statistik sederhana. Pemaparan hasil analisis data menunjukan rata-rata prosentase yang rendah yaitu 9,6%. Berdasarkan nilai persentase tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mahasiswa PG-PAUD UNIPA Surabaya tentang pendidikan inklusif masih sangat rendah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan wawasan mahasiswa PG-PAUD UNIPA Surabaya terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia[[3]](#footnote-3).

1. **Implementastasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Bekasi**

Dan yang terakhir ke 4 literatur review dari Nadia Nurul Kodariah . (6661132716). Implemtasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Bekasi. Program studi Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2015 penelitian ini meneliti tentang kurangnya program dan fasilitas pemerintah yang belum memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka (ABK) anak berkebutuhan khusus . Hal ini dapat dilhat dari hak-hak penyandang disabilitas yang seharusnya terpenuhi tetapi terabaikan oleh pemerintah . Saat ini keberadaan penyandang disabilitas masih dianggap sebelah mata , baik oleh pemerintah maupun masyarakat .

 Pada wilayah Kota Bekasi sendiri penyandang disabilitas pun sering dilewatkan dalam pembangunan kota terutama pada aspek pendidikan, dalam hal ini pendidikan inklusif. Fakta yang peneliti temukan di Kota Bekasi yaitu standarisasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan dan pembukaan pendidikan inklusif di sekolah regular mengenai anak berkebutuhan khusus ABK dalam mendapatkan pendidikan , rendahnya pemahaman dari tenga pendidik di sekolah , reguler , keterbatasan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan inklusif . Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganilisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di kota Bekasi, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif . Teori yang digunakan yaitu konsep implemetasi Mazmanian dan Sabater dalam Subarsono (2011:94) .[[4]](#footnote-4)

 Teknis analisis data yang digunakan model Irawan Prasetya. Hasil dari penelitian ini menunujukan bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di kota ini belum dilaksanakan secara optimal karena masih terdapat banyaknya hambatan dan kendala , baik pada sekolah inklusif maupun pemerintah Kota Bekasi. Oleh karena itu diprlukan usaha yang maksimal dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai institusi dan lembaga pelaksana kebijkan.

1. **Perbandingan Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Judul Penelitian | Isi Penelitian | Perbandingan dengan Penelitian Penulis |
| 1 | Indonesia (Fundarising Strategy Implementation In Save The Children Indonesia) “. |  Meneliti tujuan untuk menggambarkan strategi fundraising yang dilakukan oleh Save The Children Indonesia meliputi strategi dialogue fundraising, strategi corporate fundraising, strategi multichannel fundraising, strategi retention and development donor.  | Menguraikan apa saja yang menjadi upaya Save The Children yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas kaum disabilitas yang dirasa sejauh ini masih minimnya fasilitas dan kegiatan kegiatan yang membangun bagi kaum disabilitas.   |
| 2 | Paradigma Pendidikan Inklusif sebagai Upaya Memperluas Akses dan Perbaikan Mutu Pendidikan |  Untuk mengatasi tantangan itu bertahap international ,terjadi pergeseran paradigma pendidikan dari pendidikan yang berifat konvensional (ekslusif) ke pendidikan yang menjangkau semua anak yang bersifat inklusif.  | Mengidentifikasi apa yang menjadi kesenjangan terhadap kaum disabiltas dengan adanya upaya Save The Childern di Provinsi Jawa barat agar Terbentuk dan tebangunnya mutu kualitas kaum disabilitas. |
| 3 | Pengetahuan Mahasisiwa PG-PAUD Unipa Surabaya Tentang Pendidikan Inklusif | Untuk mewujudkan besarnya perhatian pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan inklusif, pada tahun 2009 Menteri Penidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas No.70 tentang pendidikan inklusif. | Lebih menitikberatkan pada implementasi dan upaya dari pemerintah yang akan di berikan kepada kaum disabilitas khususnya dari Pemerintah Provinsi Jawa barat. |
| 4 | Implemtasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Bekasi | mendeskripsikan dan menganilisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di kota Bekasi, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif . | Menganalisa implementasi dari Organisasi Save The Children dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. |

1. **Kerangka Teoritis**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, tentunya memiliki beberapa kajian atau tinjauan pustaka berupa teori dan konsep pemikiran yang berkaitan dengan variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini, Upaya Organisasi Save The Children Swedia untuk meningkatkan kualitas kaum disabilitas merupakan variabel bebas. Sedangkan segala upaya pengembangan pendidikan inklusif pemerintahan Provinsi Jawa Barat merupakan variabel terikat. Kemudian implementasi Save The Childern dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan pendidikan inklusif , dijadikan sebagai korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat.

Tinjauan pustaka ini berisi tentang penjelasan mengenai telaahan teori dan hasil penilitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya. Teori dan hasil penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai tolak ukur dalam meneliti masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Organisasi Internasional dan Teori ataupun Konsep-konsep NGO serta Save The Childrennya itu sendiri dan Teori tentang Kerjasama Kerjsama Intrnasional, Pendidikan Inklusif Jawa Barat , Kaum Disabiltas Jawa Barat.

1. **Kerjasama**

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing[[5]](#footnote-5).

Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama[[6]](#footnote-6).

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

1. **Kerjasama Internasional**

Kerjasama Internasional. Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan (Dougherty & Pfaltzgraff,1997:418).

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubunganhubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasinal dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasiregulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional (Dougherty&Pfaltzgraff,1997:418- 419).

Dan Holsti pun menegaskan akan pentingnya kerjasama internasional dalam buku Koesnadi Kartasasmita yang berjudul Organisasi dan Administrasi Internasional yaitu:

**“Kerja sama dalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdepedensia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional tejadi karena *national understanding* dimana mempunyai; corak dan tujuan yang sama keinginan yang didukung utnuk kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama dianatara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.”[[7]](#footnote-7)**

1. **Pendidikan Inklusif**

Pengertian Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O’Neil, 1994) Sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback,1980). Adapun J.David Smith mengatakan bahwa ;

**Banyak pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian inklusif, yang mana inklusif adalah istilah terbaru yang dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah. Inklusif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu inclusion. Bagi sebagian besar pendidik, istilah ini dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan kompeherensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh.[[8]](#footnote-8)**

Konsep Pendidikan inklusif

Tujuan pendidikan inklusi adalah disamping untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar juga untuk menyamakan hak dalam memperoleh pendidikan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat dasar dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya di Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana anak-anak normal lainnya.[[9]](#footnote-9)

1. **Kaum Disabilitas Indonesia**

Pengertian Penyandang Disabilitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[[10]](#footnote-10) penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak[[11]](#footnote-11).

1. **Disabilitas**

Disabilitas Pengertian disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability yang berarti cacat atau ketidakmampuan.Anak dengan disabilitas atau sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya (Triutari, 2014).

Anak dengan disabilitas dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu anak dengan penurunan fungsi tubuh, keterbatasan dalam beraktivitas dan pembatasan dalam berprestasi. Anak-anak disabilitas termasuk orang-orang dengan kondisi kesehatan seperti cerebral palsy, spina bifida, distrofi otot,cedera tulang belakang traumatik, down sindrom, dan anak-anak dengan gangguan pendengaran, visual, fisik,komunikasi dan gangguan intelektual (WHO, 2012).

1. **Organisasi Internasional**

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang organisasi internasional, diantaranya;

1. **May Rudy** ,

“**Pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah dari negara-negara yang berbeda.”[[12]](#footnote-12)**

1. **T. Sugeng Istanto** ,

 “**Yang dimaksud dengan organisasi internasional dalam artian luas adalah bentuk kerja sama antar pihak yang bersifat internasional dan untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu dapat berupa orang perorangan, badan-badan bukan negara dari berbagai negara, atau pemerintah negara. Adapun yang menyangkut tujuan internasional adalah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai negara.”**

Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of* *membership*). Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau *Intergovermental* *Organizations* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-Govermental Organizations* (INGO). Dalam hal jangkauan keanggotaan, organisasi internasional ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan satu jenis lagi dimana keanggotaannya mencakup seluruh wilayah di dunia. (Archer, 1983:35).

Konsep dan praktek dasar yang melandasi IGO modern melibatkan diplomasi, perjanjian, konferensi, aturan-aturan dan hukum perang, pengaturan penggunaan kekuatan, penyelesaian sengketa secara damai, pembangunan hukum internasional, kerjasama ekonomi internasional, kerjasama sosial internasional, hubungan budaya, perjalanan lintas negara, komunikasi global, gerakan perdamaian, pembentukan federasi dan liga, administrasi internasional, keamanan kolektif, dan gerakan pemerintahan dunia (Bennet, 1995:9). INGO, menurut Clive Archer, terdiri atas anggota-anggota yang bukan merupakan perwakilan atau delegasi dari pemerintah suatu negara, namun, kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi, organisasi-organisasi ataupun individu-individu dari suatu negara. Definisi tersebut lebih dikenal dengan aktor-aktor non-negara pada tingkat internasional, dimana aktivitas mereka mengakibatkan meningkatnya interaksi-interaksi internasional (Archer, 1983: 40).

Secara sederhana, dari beberapa bantuan definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang baik gerakannya, maupun pelakunya melintasi batas sebuah negara, berangkat dari kesepakatan masing-masing anggota untuk bekerja sama, memiliki regulasi yang mengikat anggota, dan untuk mewujudkan tujuan internasional tanpa meleburkan tujuan nasional dari masing-masing anggota dari organisasi internasional yang bersangkutan.

Definisi dan Klasifikasi Organisasi Internasional Upaya mendefinisikan organisasi internasional harus melihat pada tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non-negara (Coulombis & Wolfe, 1986:276)

Definisi lain dari organisasi internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuantujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesame kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 1993: 3).

1. **Non Government Organization (NGO)**

Menurut United Nations (2005), Non Govermental Organization (NGO) adalah: "setiap kelompok nirlaba, warga secara sukarela yang diselenggarakan pada tingkat lokal, nasional atau internasional. Berorientasi pada tugas dan yang didorong oleh orang-orang yang memiliki kepentingan bersama, LSM melakukan berbagai layanan dan fungsi kemanusiaan, membawa kekhawatiran warga negara kepada Pemerintah, memantau kebijakan dan mendorong partisipasi politik di tingkat komunitas. Mereka menyediakan analisis dan keahlian, berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini dan membantu memantau dan menerapkan perjanjian internasional. Beberapa diorganisasikan seputar isu-isu spesifik, seperti hak asasi manusia, lingkungan atau kesehatan. ”[[13]](#footnote-13). Sedangkan menurut Willetts (2011) yaitu ;

“Mengungkapkan bahwa NGO muncul di ranah internasional sejak munculnya piagam PBB yang tertuang pada pasal 71 yang menyatakan bahwa dewan ekonomi dan sosial dapat membuat kesepakatan untuk berkonsultasi dengan NGO yang memiliki kepentingan sesuai kompetensinya sebagai penjembatan antara masyarakat sipil dan pemerintah. NGO mulai menyadari perlunya berkontribusi untuk merubah pemikiran bahwa pembangunan seharusnya memprioritas keterlibatan masyarakat sipil pada setiap perencanaan. Fungsi NGO melalui advokasi bertujuan mempengaruhi para pengambil keputusan dan opini publik untuk membawa perubahan ditingkat nasional serta internasional bagi kepentingan masyarakat miskin”.

Non-Governmental Organization World Bank (1992, dalam Kim, Y., 2011) memberikan definisi mengenai Non-Governmental Organization sebagai kelompok dan lembaga yang seluruh atau sebagian besar independen dari pemerintah dan memiliki tujuan utama yakni kemanusiaan atau kooperati.

1. **Hubungan Internasional**

Terjalinnya hubungan suatu negara atau non negara dengan negara lainnya tidak akan terlepas dari konteks hubungan internasional. Dinamika hubungan internasional menghasilkan pergeseran paradigma dimana sebelumnya dunia ini diwarnai kekerasan dan peperangan hingga masa sekarang yang didominasi oleh kerjasama. J.C. Johari berpendapat bahwa hubungan internasional merupakan hubungan atau interaksi antar aktor-aktor, baik negara maupun non-negara, yang bisa berbentuk hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang memiliki konsekuensi penting bagi aktor lain di luar yurisdiksi unit politiknya.[[14]](#footnote-14) Sedangkan menurut K.J Holsti,

**“Hubungan Internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan pemerintah maupun warga negaranya. Pengkajian hubungan internasional yang meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, komunikasi serta pengembangan nilai-nilai dan etika internasional.”[[15]](#footnote-15)**

Pada dasarnya, hubungan internasional memiliki aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Aktor-aktor tersebut berupa negara (*state actor*) dan non-negara (*non-state actor*) seperti organisasi internasional, *Multinational Corporations* (MNCs)/*Transnational Corporations* (TNCs), *Non-Governmental Organization* (NGO), privat, dan lain sebagainya. Dalam melakukan interaksi atau aktivitas internasional, mereka akan cenderung saling ketergantungan satu sama lain karena tidak ada yang dapat memenuhi kepentingannya sendiri sehingga melakukan hubungan internasional merupakan suatu keharusan seperti halnya yang dikemukakan oleh Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani sebagai berikut:

**”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.”[[16]](#footnote-16)**

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan interaksi antar negara yang melampaui batas wilayah. Terdapat berbagai aspek dalam hubungan internasional seperti ekonomi, politik, militer, sosial, budaya, lingkungan dan lain-lain. Namun, pada intinya hubungan internasional lebih menitikberatkan terhadap perilaku aktor yang menciptakan interaksi berupa kerjasama atau konflik karena setiap aktor tersebut memiliki kepentingan nasional (*national interest*) nya masing-masing.

1. **Save The Children**

Save the Children, adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang mempromosikan hak-hak anak, menyediakan bantuan dan membantu mendukung anak-anak di negara-negara berkembang. Organisasi ini didirikan di Inggris pada tahun 1919 dalam rangka meningkatkan kehidupan anak-anak melalui pendidikan yang lebih baik, perawatan kesehatan, dan kesempatan ekonomi, serta memberikan bantuan darurat akibat bencana alam, perang, dan konflik lainnya.

Mereka percaya setiap anak layak mendapat masa depan. Di seluruh dunia, kami memberi anak-anak awal yang sehat dalam hidup, kesempatan untuk belajar dan perlindungan dari bahaya. Kami melakukan apa pun untuk anak-anak setiap hari dan di saat krisis mengubah hidup mereka dan bagi masa depan yang kami.[[17]](#footnote-17)

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, menimbulkan hipotesis penelitian bahwa:

*“Jika Organisasi Save The Chikdren dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kerjsama untuk melakukan pembangunan Sumberdaya Guru-guru aksesibilitas serta fasilitas pemenuhan hak anak disabilitas serta mempromosikan kesempatan belajar dengan seacara merata dan* *memperjuangkan hak mereka , maka kualitas kaum disabilitas pendidikan inklusif akan mengalami peningkatan di bidang pendidikan inklusif serta menumbuhkan potensi kuliatas kaum disabiltas itu sendiri sehingga menjadi tolak ukur positif untuk semua Provinsi.*

1. **Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis Data)** |
| **Variabel Bebas** *Jika Organisasi Save The Chikdren dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kerjsama untuk melakukan pembangunan Sumberdaya Guru-guru aksesibilitas serta fasilitas pemenuhan hak anak disabilitas serta mempromosikan kesempatan belajar dengan seacara merata dan memperjuangkan hak mereka*  | Penerapan Program dari Save The Children menyelematkan kehidupan anak-anak, berjuang untuk hak anak dan memberdayakan SDM guru-guru agar dapat berkompeten serta membantu anak memenuhi potensinya. | Save The Children, organisasi independen global terkemuka bagi anak menggelar berbagai kegiatan di Jawa Barat. program-program yang telah dilaksanakan di kabupaten/kota di Jawa Barat tersebut, antara lain berupa program untuk pendidikan inklusi dan rehabilitasi anak-anak disabilitas berbasis masyarakat, bekerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Barat.<http://jabarprov.go.id/index.php/news/14176/Save_The_Children_Membantu_Pemenuhan_Hak_Anak>Program 1.200 sekolah inklusi dan beasiswa guru ABK dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan, kompetensi, dan kemampuan guru. Selain itu, kami juga akan terus melakukan pemantauan dan supervisi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Namun, kendala saat ini adalah masih ada guru yang belum siap untuk memberi pelajaran bagi ABK dan keluarga yang memiliki ABK pun masih ada yang lebih memilih menyekolahkan di SLB,”http://prfmnews.com/berita.php?detail=2018-disdik-jabar-targetkan-1200-sekolah-inklusif-serta-beasiswa-guru-abk |
| **Variabel Terikat :***maka kualitas kaum disabilitas pendidikan inklusif akan mengalami peningkatan di bidang pendidikan inklusif serta menumbuhkan potensi kuliatas kaum disabiltas itu sendiri sehingga menjadi tolak ukur positif untuk semua Provinsi* | Penerapan program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Barat. | Ikea dan pemerintah akan memastikan bukan hanya anak yang bersekolah di sekolah umum, tapi juga semua anak, baik anak miskin, anak berkebutuhan khusus (disabilitas), anak kaum minoritas. kita perlu lebih inklusif dalam isu tersebut dan juga perlu melihat ke depan apa yang akan kita lakukan pada generasi berikutnya di Indonesia,<http://www.bandungkab.go.id/arsip/ikea-foundation-dan-save-the-children-akan-sokong-p2tp2a>Keberadaan anak penyandang disabilitas, perlu dibangun kekompakan dan kebersamaan antara para orang tua dan lingkungan sosial untuk mendukung tumbuh kembang anak dan remaja penyandang disabilitas.Sebab kata Deddy, "Kita juga harus terus berupaya membangun keluarga yang tangguh dan berdaya juang, melalui peningkatan pengetahuan, motivasi dan keterampilan dalam menggali serta mengembangkan potensi dan keunikan yang ada pada diri anak dan remaja penyandang disabilitas,"http://jabarprov.go.id/index.php/news/23346/2017/06/03/Pelayanan-Dasar-Sosial-Kunci-Tumbuh-Kembang-Anak-Disabilitas |

1. **Skema Kerangka Konseptual**

**Alur Penelitian**

“Upaya Organisasi Save The Children dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pendidikan Inklusif di Jawa Barat Untuk Meningkatkan Kualitas Kaum Disabilitas”

**HUBUNGAN BILATERAL**

**Save The Children**

**Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

**COOPERATIV**

**Pendidikan Inklusif di Jawa Barat Untuk Meningkatkan Kaum Disabilitas**

1. Yessi Rachmasari, Soni Akhmad Nulhaqim, Nurliana Cipta Apsari, “Penerapan Strategi Fundarising di Save The Children”. Alumni Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Penelitian diterbitkan tahun 2014. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaenal Alimin” Paradigma Pendidikan Inklusif sebagai Upaya Memperluas Akses dan Perbaikan Mutu Pendidikan Sekolah” Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Riset yang di terbitkan tahun 2013. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muchamad Irvan “PENGETAHUAN MAHASISWA PG-PAUD UNIPA SURABAYA TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF” Universitas PGRI Adi Buana Surabaya diterbitkan tahun 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. Nadia Nurul Kodariah “Implemtasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Bekasi” Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2015. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 h. 156 [↑](#footnote-ref-5)
6. W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985. h. 492 [↑](#footnote-ref-6)
7. Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, (Jakarta: Pustaka Remaja, 1987), hal 28. [↑](#footnote-ref-7)
8. J. David Smith, ed. Mohammad Sugiarmin, Mif Baihaqi, Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua, (Bandung: Nuansa, 2006),hal 6. [↑](#footnote-ref-8)
9. www.ditplb.or.id/2006/index.php?menu:profile&pro:42-64k-3k [↑](#footnote-ref-9)
10. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008) [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) [↑](#footnote-ref-11)
12. T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal 3 [↑](#footnote-ref-12)
13. United Nations (2005), Non Govermental Organization (NGO) [↑](#footnote-ref-13)
14. J.C Johari 1985 dalam Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal 71. [↑](#footnote-ref-14)
15. K. J. Holsti, *Politik Internasional* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1988), hal 21-22. [↑](#footnote-ref-15)
16. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Moochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2011), hal 3-4. [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://www.savethechildren.net> diakses 24 april 2018 [↑](#footnote-ref-17)